

INTISARI

Tujuan penelitian ini untuk memberikan deskripsi dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengkait tentang pendapatan asli daerah serta mengadakan evaluasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam pengaruhnya terhadap penerimaan PAD juga mengadakan inovasi pembaharuan aturan dibidang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bagi penyusunan kebijakan yang mengarah pada peningkatan PAD sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang keputusan keputusan hukum (das Sollen) yang mengkait dengan PAD, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah. Data tentang pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah atau realisasi keputusan keputusan hukum (das Sein) tentang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang berupa data APBD yang terdiri dari data penerimaan daerah (yaitu, PAD, Sumbangan dan Bantuan, Dana perimbangan, Lain-lain penerimaan yang sah). PAD yang terdiri dari data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Data tersebut diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta. Cara menganalisis menggunakan deskriptif sistematik.

Hasil analisis selama periode pengamatan dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2002 menunjukkan adanya kenaikan rata-rata setiap tahunnya yaitu Pajak Daerah 28,83%, Retribusi Daerah 17,07 %, Lain-lain PAD yang sah 98,07 % Laba BUMD 31,99 %, dan Penerimaan Dinas-dinas 1,99 % Laju pertumbuhan PAD rata-rata 31,45%, dan laju pertumbuhan rata-rata tertinggi dicapai oleh Penerimaan Lain-lain 98,07 %

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dapat dikatakan bahwa peranan PAD cukup besar dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian maka upaya untuk dapat meminimalkan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat bisa diwujudkan.

Kata kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Otonomi daerah, Tahun anggaran*

ABSTRACTS

The aim of this scrutinization is to give a description about the implementation of the Act No.22/1999 which has involvement with the Real Regional Income and to make an evaluation on the implementation of the Act No.22/1999 its influent to the Real Regional Income and also to make an innovation to renew the Real Regional Income in the scope of the implementation of the Regional Autonomy in Yogyakarta city. The result of this scrutinization is hoped to be able to get a material for making policy which tends to increase the Real Regional Income as a realization of the Regional Autonomy.

The data used in this scrutinization is the data about the decision of law or regulation (das Sollen) which has involvement with the Real Regional Income, they are the Act, government regulation, minister regulation, lacial regulation. The data explaining about the implementation of the management of the Regional Financial in the scope of the implementation of the Regional Autonomy are local budget data which are composed of The Regional Incoma data and the Routine Purchase of the Dinas Pendapatan Daerah and the Real Regional Income which are composed of the Regional Tax, the Regional Retribution, the Profit of the local commite profit , the Income from Offices and others. The data are taken from BPKD Yogyakarta city. The analitical technics uses deskriptic systematics.

The result of the analization along the period of scrutinization from the Budgetary year 1997 / 1998 to the Budgetary year 2002 is that the rate of the contribution of the sources of the Real Regional Incone against the total of the Real Regional Incone in secuence are Regional Tax is 53.02 per cent. Regional Retribution is 36.56 per cent. Other incomes is 4.87 per cent. The profit of the is 3.53 per cent and The Income from Offices is 1.99 per cent. The growth rate of the Real Regional Income is 15.39 per cent and the highes of the growth rate is reached by the Other Incomes that is 41.64 per cent, followed by the Profit of the local commite profit is 32.51 per cent. Regional Retritution is 15.61 per cent. Regional Tax is 15.03 per cent and the Other Incomes is 9.06 per cent.

In the scope of the implementation of the Regional Autonomy is able to be spoken that the Real Regional Income has a great role in paying for the governmental process and the Regional development. So the effort to minimalize the dependency to the National Government can be realized.

Key Word : *The Real Regional Income, Local autonomy, Budgetary year*